
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BELA NEGARA DI SEKOLAH DASAR

Imada Khairunisa¹, dan Erik Aditia Ismaya²

¹SD Demangan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, ²Universitas Muria Kudus

Email: imadakhairunisa1@gmail.com, erik.aditia@umk.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diserahkan 30 Januari 2020

Direvisi 3 Maret 2020

Disetujui 4 Maret 2020

Keywords:

state defense education
Pancasila and citizenship
education learning,
social studies learning,
flag ceremonies

Abstract

The purpose of this study is to analyze the form of state defense education in elementary school students and analyze the implementation of state defense education in SD Demangan Kecamatan Kota Kudus Regency.

The research method used is a qualitative approach to the method of literature (library research) and field study methods and types of descriptive research. Data collection in library research is carried out by examining and / or exploring journals, books and documents (both printed and electronic) as well as data sources and / or other information relevant to research. Meanwhile in the field study method the data was collected using observation and interview methods. Researchers are the main instrument of research. The validity of the research data used source triangulation techniques. Data analysis uses the interactive model of Miles & Huberman.

The results found that state defense education at the elementary school level was included in the Citizenship Education curriculum which was supported by extra-curricular activities in Scouting. National defense education for elementary / MI students and equivalent is delivered for five days with a total of 26 hours of study for 30 minutes each. SD Demangan carries out a state defense education program through intra-curricular activities in the form of Pancasila and Citizenship Education learning, Social Studies learning and flag ceremonies. As well as extra-curricular scouts every Friday and Saturday.

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis bentuk pendidikan bela negara pada siswa sekolah dasar dan menganalisis implementasi pendidikan bela negara di SD Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode kepastakaan (*library research*) dan metode studi lapangan serta tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian kepastakaan dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang relevan dengan penelitian. Sementara itu pada metode studi lapangan data dikumpulkan menggunakan metode observasi dan wawancara. Peneliti merupakan instrumen utama riset. Validitas data penelitian digunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menemukan bahwa pendidikan bela negara di tingkat sekolah dasar masuk ke dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang didukung dengan kegiatan ekstra kulikuler Pramuka. Pendidikan bela negara bagi siswa SD/MI dan sederajat disampaikan selama lima hari dengan jumlah 26 jam pelajaran masing-masing selama 30 menit. SD Demangan melaksanakan program pendidikan bela negara melalui kegiatan intra kurikuler berupa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan upacara bendera. Serta ekstra kurikuler pramuka setiap hari Jum'at dan Sabtu.

PENDAHULUAN

Dalam mendiskusikan bela negara maka terdapat dua ungkapan yang sering kita dengar. Yang pertama sebagaimana disampaikan Shihab (2018) bahwa pada abad XIX, Lord Palmerston dari Inggris menyatakan “*right or wrong it is my country*”. Benar atau salah adalah negeri saya. Yakni negara harus selalu dibela. Dibela dengan mendukungnya jika benar dan dibela dengan meluruskan kesalahannya jika salah. Cinta itulah benih nasionalisme dan kewarganegaraan. Yang kedua sebagaimana diungkapkan John F. Kennedy (1961) bahwa “jangan tanya apa yang dilakukan oleh negara untukmu tapi tanyalah apa yang kamu bisa lakukan untuk negara”.

Berdasarkan dua ungkapan diatas maka bela negara merupakan persoalan yang melibatkan warga negara dan negara. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945) secara eksplisit mengatur kewajiban warga negara Indonesia (WNI) untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal 27 ayat 3 UUD NKRI 1945 menyatakan “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

Bela negara yang identik dengan perang fisik di era revolusi telah berubah bentuknya pada era globalisasi. Meminjam pendapat Giddens (1999) maka globalisasi bisa dipahami dari konsep *time-space distinction*. Globalisasi tidak hanya menyangkut masalah ekonomi tetapi juga menyangkut informasi dan transportasi (Wibowo dalam Giddens, 1999: xv). Globalisasi adalah suatu kondisi di mana tak satupun informasi yang dapat ditutup-tutupi, semua transparan. Akibatnya, pola hubungan manusia menjadi semakin luas, bukan saja pribadi dengan pribadi, melainkan juga semakin terbukanya komunikasi yang simultan, mengglobal sehingga dunia menjadi—meminjam istilah Marshall McLuhan—‘desa besar’ atau *global village*.

Keterbukaan dan kemudahan akses di era globalisasi menyebabkan arus informasi dari segala penjuru dunia seolah tidak terbendung. Berbagai ideologi masuk dan berkembang serta menarik perhatian masyarakat Indonesia. Perlahan-lahan sebagian masyarakat Indonesia terjerumus pada ideologi radikal serta tidak lagi mempedulikan rasa cinta tanah air, nilai-nilai nasionalisme, dan semangat rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia yang merupakan warisan leluhur bangsa.

Penelitian Susanto (2007), riset Saifuddin (2011), penelitian Rokhmad (2012), dan riset Riyanta (2020) menjadi bukti bahwa ada masyarakat Indonesia yang terpapar ideologi radikal. Penelitian Susanto (2007) menyimpulkan bahwa diakui ada pondok pesantren—terutama yang berbasis salafiyah-wahabiyah—yang memang memberikan kontribusi pada radikalisme. Sementara itu riset Saifuddin (2011) menyimpulkan bahwa fenomena radikalisme di kalangan mahasiswa benar adanya, sesuatu yang dapat dipegang dan meskipun pada dasarnya gerakan seperti ini menggunakan sistem sel yang kasat mata, adanya ibarat angin yang bisa dirasakan tapi sulit dipegang.

Lebih lanjut penelitian Rokhmad (2012) menyimpulkan bahwa (1) beberapa guru mengakui adanya konsep Islam radikal yang mungkin menyebar di kalangan siswa karena kurangnya pengetahuan keagamaan; (2) unit-unit kajian Islam di sekolah-sekolah berkembang baik namun tidak ada jaminan adanya kekebalan dari radikalisme karena proses belajarnya diserahkan kepada pihak ketiga; (3) di dalam buku rujukan dan kertas kerja terdapat beberapa pernyataan yang dapat mendorong siswa untuk membenci agama atau bangsa lain. Sementara itu Riyanta (2020) menyebut bahwa pada tahun 2018 terdapat 19,4% pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Lebih lanjut, secara mengejutkan Menteri Pertahanan periode 2014-2019 Ryamizard Ryacudu menyebutkan bahwa tiga persen anggota TNI terpapar paham radikal. Data lain pada bulan Mei 2019 menyebut seorang anggota Polwan di Polda Maluku Utara terpengaruh paham radikal dan pada 2015 seorang anggota Polres Batanghari Brigadir Syahputra diketahui bergabung dengan ISIS di Suriah.

Melihat fenomena terpaparnya sebagian masyarakat Indonesia terhadap paham radikal maka negara tidak boleh membiarkannya. Negara perlu menyemai kembali kesadaran cinta tanah air, dan semangat rela berkorban untuk bangsa dan negara kepada generasi muda, salah satunya melalui pendidikan bela negara. Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah pada artikel ini yaitu 1) bagaimana bentuk pendidikan bela negara pada siswa sekolah dasar? 2) bagaimana implementasi pendidikan bela negara di SD Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus?

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*) dan metode studi lapangan serta tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang relevan dengan penelitian.

Metode studi lapangan dimaksudkan untuk melihat dari dekat implementasi pendidikan bela negara di SD Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk melihat pelaksanaan pendidikan bela negara. Sementara itu, wawancara dilakukan kepada guru dan siswa sebagai informan utama serta kepala sekolah sebagai informan pendukung.

Peneliti merupakan instrumen utama riset. Validitas data penelitian digunakan teknik triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman (1992) yakni dilakukan secara berlanjut, berulang dan terus-menerus di dalam melaksanakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pendidikan Bela Negara pada Siswa Sekolah Dasar

Bela negara merupakan sebuah kesadaran diri yang bersifat dinamis. Bela negara di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 dan 2. Kementerian Pertahanan (2010) menyebut bela negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan bernegara.

Bela negara merupakan sebuah semangat yang bersifat dinamis, dimana bela negara yang ada di tengah masyarakat bisa berubah kapan saja, dimana saja, dan dalam kondisi apa saja, namun bela negara tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Bela negara harus dijalankan secara sistematis dan terarah, salah satunya melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan

dipilih karena pendidikan merupakan ruang dalam pembangunan kesadaran bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan merupakan kegiatan untuk membantu perkembangan peserta didik mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Meningat pendidikan di terdiri dari berbagai jenjang maka pelaksanaan bela negara harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya pada setiap jenjang pendidikan.

Kementerian Pertahanan sebagai penanggung jawab pendidikan bela negara melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan telah menyusun kurikulum bela negara, yang disahkan sejak 3 Mei 2016. Terdapat tujuh kurikulum yang disusun Badan Diklat Kemenhan, namun baru lima kurikulum yang sudah disahkan, yaitu untuk tingkat dini (PAUD/TK dan sederajat), SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Sedangkan Kurikulum Pembina Madya dan Pembina Utama masih dalam rancangan. Pembina Madya dan Utama ditujukan untuk bela negara di tingkat kementerian atau lembaga, BUMN maupun BUMD, pemerintah daerah tingkat provinsi dan TNI atau angkatan.

Secara khusus, pendidikan bela negara di tingkat sekolah dasar masuk ke dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang didukung dengan kegiatan ekstra kurikuler seperti Pramuka. Setiap siswa ditanamkan ilmu dan pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang mengakar pada nilai-nilai agama, budaya, dan perjuangan bangsa di sekolah. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa sebagai warga negara yang berkarakter serta bertanggung jawab terhadap kesuksesan pembangunan bangsa Indonesia.

Pendidikan bela negara bagi siswa SD/MI dan sederajat disampaikan selama lima hari dengan jumlah 26 jam pelajaran masing-masing selama 30 menit. Penyampaian materi bela negara dirancang disampaikan di Masa Orientasi Sekolah (MOS) atau pada kegiatan ekstra kurikuler. Untuk siswa SD, materi dasar mulai masuk ke pengenalan sejarah perjuangan bangsa mulai dari perang Hindia Belanda, pengenalan tokoh-tokoh pejuang bangsa, hingga pengenalan museum perjuangan. Siswa sekolah dasar juga dikenalkan tentang ancaman nasional seperti narkoba, perkelahian pelajar hingga pornografi.

Kurikulum bela negara juga mengajarkan siswa sekolah dasar mengenai nilai-nilai bela negara seperti: a). mencintai bahasa dan budaya Indonesia, b). mencintai produk dalam negeri

c). menanamkan cinta perdamaian, d). mencintai sesama manusia, e). gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, f). berani membela kebenaran dan keadilan, g). menunjukkan rasa persatuan, h). suka menolong, i). tidak boros dan bergaya hidup mewah, j). tidak merugikan kepentingan umum, k). mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, l). menanamkan rasa persahabatan dan gotong royong, m). penjabaran nilai-nilai lima sila Pancasila, dan n). mengetahui secara terbatas nilai-nilai rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

Siswa sekolah dasar dikenalkan pula kemampuan awal bela negara seperti aturan baris-berbaris, sikap sempurna dan sikap istirahat, contoh penghormatan dalam baris-berbaris, pengenalan tata upacara, pertolongan pertama lapangan (longmalap), hingga prinsip-prinsip kebhinnekaan dan adat istiadat serta materi terbatas mengenai Badan Pengumpul Keterangan (Bapulket) seperti cara memperoleh informasi dengan mendengar, melihat dan mengamati, hingga cara melaporkan informasi.

Pelaksanaan pendidikan bela negara di Indonesia yang dimulai sejak usia dini merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam rangka mempertahankan eksistensi bangsa dan negara Indonesia di era global. Harapannya generasi muda memiliki keteguhan hati untuk mencintai bangsa dan negara Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara Indonesia serta tidak mudah terjerumus kepada paham radikal yang beredar.

Pelaksanaan pendidikan bela negara di Indonesia memiliki perbedaan dengan pendidikan bela negara di Singapura, Swiss, Israel dan Swedia. Berdasarkan dokumen Singapore Enlistment Act 2001 (Soepandji dan Farid, 2018) diketahui bahwa program bela negara di Singapura dikenal dengan nama *National Service* (NS). Program bela negara di Singapura selama dua tahun merupakan kewajiban bagi setiap laki-laki berkewarganegaraan Singapura, maupun penyandang status sebagai penduduk tetap (*permanent resident* atau PR) generasi kedua (mendapat status PR dari orangtuanya) yang telah berusia 18 tahun. Akan tetapi, para wajib NS sudah harus sudah mendaftar keikutsertaan mereka sejak mulai memasuki usia 16 tahun 6 bulan.

Sementara itu, Swiss atau Switzerland memiliki program bela negara dalam bentuk wajib militer. Konstitusi Swiss menyebutkan

bahwa wajib militer dikenakan bagi setiap laki-laki warga negara Swiss, dan bersifat suka rela bagi perempuan. Dalam hal ini, pria yang berusia 19 hingga 25 tahun bertanggungjawab untuk mengikuti pelatihan militer selama 18 minggu hingga 21 minggu. Dari pelatihan itu, para peserta akan dibagi menjadi dua golongan, yaitu komponen cadangan dan mereka yang menjadi bagian dari departemen pertahanan (*officers*). Komponen cadangan akan melaksanakan tugas mereka hingga usia 34 tahun dengan total kewajiban bertugas selama 260 hari. Sedangkan mereka yang menjadi *officers* memiliki kewajiban tugas hingga usia 50 tahun dengan total kewajiban bertugas selama 600 hari.

Negara lain yang menerapkan bela negara dalam bentuk wajib militer adalah Israel dan Swedia. Menurut undang-undang pertahanan di Israel, wajib militer merupakan kewajiban bagi warga negara, dengan pengecualian warga Arab. Pada Maret 2107, Swedia kembali menghidupkan wajib militer yang sudah dihentikan pada 2010, dengan alasan melihat perkembangan politik yang terjadi di wilayah Baltik, antara lain upaya Rusia menganeksasi Krimea pada tahun 2014, konflik di Ukraina, dan latihan militer Rusia di kawasan itu.

Bela negara sebagai upaya memupuk semangat cinta tanah air serta rela berkorban untuk bangsa dan negara merupakan fenomena global. Bentuk bela negara pun berbeda-beda sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara. Khusus bagi Indonesia, persoalan terpaparnya sebagian masyarakat Indonesia terhadap paham radikal merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan segera. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan Kementerian Pertahanan untuk melaksanakan pendidikan bela negara dari usia dini patut diapresiasi dan dikawal implementasinya sehingga tidak lagi ada warga negara Indonesia yang terpapar paham radikal.

2. Implementasi Pendidikan Bela Negara di SD Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

SD Demangan merupakan salah satu lembaga pendidikan tingkat dasar yang bertanggungjawab melaksanakan pendidikan bela negara. SD Demangan beralamat di Jl. Kyai Telingsing No. 39 RT 2 / RW 1 Desa Demangan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. SD Demangan berdiri pada 1 Februari 1986 dengan status Negeri serta terakreditasi “A”.

Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, SD Demangan memiliki visi

dan misi yang akan dicapai. Adapun visi SD Demangan yaitu "Berprestasi, mulia dalam akhlaq, mandiri dalam hidup". Sedangkan misi SD Demangan yakni 1) Melaksanakan perilaku, bimbingan ibadah dan lingkungan sekolah, 2) Menyiapkan tenaga kependidikan yang profesional yang siap mendidik siswa, 3) Menumbuhkembangkan semangat cinta tanah air, 4) Menciptakan kondisi sehat lingkungan belajar yang bersih dan indah, dan 5) Mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat untuk mendukung keberhasilan pendidikan.

SD Demangan sebagai salah satu unsur pelaksana pendidikan bela negara berusaha secara baik dan optimal untuk mensukseskan program pendidikan bela negara melalui kegiatan intra kurikuler maupun ekstra kurikuler. Bentuk pendidikan bela negara dalam kegiatan intra kurikuler yaitu pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kelas I sampai kelas VI, dan upacara bendera tiap hari Senin serta upacara bendera pada hari besar kenegaraan seperti peringatan hari kemerdekaan setiap 17 Agustus, upacara hari pahlawan setiap 10 November, dll.

Peneliti yang merupakan guru kelas V SD Demangan secara khusus menyisipkan pendidikan bela negara pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Semua materi pelajaran IPS di kelas V pada semester I dan semester II menjadi pintu masuk bagi upaya pendidikan bela negara yang peneliti lakukan. Adapun secara spesifik materi ajar yang dimaksud yaitu materi mengenai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia serta jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia yang disampaikan pada semester I serta materi mengenai perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang, persiapan kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan, dan mempertahankan Indonesia yang diajarkan pada semester II.

Pelaksanaan pendidikan bela negara yang peneliti lakukan pada mata pelajaran IPS memiliki persamaan dengan riset Septiani (2014) dan penelitian Wardana dan Shalehuddin (2017). Penelitian Septiani (2014) menemukan bahwa perilaku yang ditunjukkan peserta didik sebagai perwujudan cinta terhadap tanah air adalah melaksanakan upacara bendera dengan hikmat, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan kondusif, hormat dan santun kepada bapak/ibu guru, ikut menjaga lingkungan sekolah supaya tetap selaras, serasi dan seimbang. Sementara itu

Wardana dan Shalehuddin (2017) menyimpulkan bahwa pelaksanaan materi bela negara dalam membentuk karakter cinta tanah air mata pelajaran IPS, guru berpedoman pada RPP dan silabus. Dalam membentuk karakter cinta tanah air peserta didik, guru memasukkan karakter cinta air kedalam tahap-tahap pembelajaran. Tahap tahap tersebut meliputi pendahuluan, inti, dan penutup.

Lebih lanjut, untuk memantapkan pendidikan bela negara di SD Demangan maka dilaksanakan ekstra kurikuler pramuka. Ekstra kurikuler pramuka di SD Demangan dilaksanakan setiap hari Jum'at untuk kelas 3 dan kelas 4 serta setiap hari Sabtu untuk kelas 5 dan kelas 6 serta didampingi oleh masing-masing guru kelas sebagai Pembina. Secara khusus ekstra kurikuler pramuka dilatih oleh Kak Monika Guniasari, S.Pd., Gr., yang telah memiliki Ijazah Kursus Mahir Dasar Pembina Pramuka.

Pemilihan ekstra pramuka sebagai media dalam pendidikan bela negara diperkuat dengan riset Ismaya (2012), Sumarlika, Alfiandra, Kurnisar (2015), Nainggolan (2016), serta Ismaya dan Romadlon (2017). Penelitian Ismaya (2012) menyimpulkan bahwa anggota ambalan Jodhipati-Candrasari memiliki mental baja dan menjadi pribadi yang santun serta sukses dalam menjalani hidupnya, memiliki semangat persatuan dan kesatuan serta jiwa sosial yang tinggi kepada sesama hidup, juga rasa *handarbeni dan hangkrukebi* terhadap ambalan Jodhipati-Candrasari.

Sementara itu penelitian Sumarlika, Alfiandra, Kurnisar (2015) menyebut bahwa *the scout's extracurricular activities has very functioning. It is evident from as much as 87.7% of students strongly agree with the scouts in shaping the character of students. Accordingly, the researchers suggested that students continue to actively follow a good scout activities held in school and outside school.* Lebih lanjut riset Nainggolan (2016) menyatakan kepramukaan dapat membina sikap nasionalisme pada siswa di sekolah dasar sebanyak 91 frekuensi menjawab sangat setuju atau 56,9% dan yang menjawab setuju sebanyak 69 frekuensi atau 43,1%. Kemudian penelitian Ismaya dan Romadlon (2017) menemukan bahwa dalam rangka membentuk karakter semangat kebangsaan anggota pramuka Ambalan Kyai Mojo dan Nyi Ageng Serang, strategi yang ditempuh yaitu dengan mengadakan latihan rutin dan latihan Satuan Karya Pramuka (SAKA). Semangat kebangsaan terus tumbuh dan berkembang

dalam jiwa setiap anggota pramuka Ambalan Kyai Mojo dan Nyi Ageng Serang ketika dilantik menjadi Penegak Bantara dengan Semangat Tri Satya dan Dasa Darma sebagai pedoman bagi setiap Penegak Bantara Ambalan Kyai Mojo dan Nyi Ageng Serang menjadi seorang patriot paripurna.

Implementasi pendidikan bela negara yang dilakukan di SD Demangan diharapkan mampu membentuk semangat cinta tanah air serta kesadaran untuk rela berkorban bagi bangsa dan negara Indonesia pada diri siswa. Pelaksanaan pendidikan bela negara di SD Demangan yang diimplementasikan melalui kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler merupakan contoh kecil upaya pelaksanaan bela negara yang jauh dari sempurna sehingga langkah kecil yang dilakukan SD Demangan harus didukung dan dikawal serta ditiru oleh lembaga pendidikan lainnya.

Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan riset Leonardi (2013), penelitian Rahmawati (2017), dan riset Sinaga (2017). Penelitian Leonardi (2013) menyimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi bela negara yang diselenggarakan oleh Direktorat Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berpengaruh signifikan terhadap sikap bela negara guru sekolah dasar di Jakarta. Materi yang disampaikan pada sosialisasi bela negara berpengaruh signifikan terhadap sikap bela negara guru sekolah dasar di Jakarta.

Lebih lanjut riset Rahmawati (2017) menemukan bahwa terdapat perbedaan sikap nasionalisme sebelum dan setelah dilakukan *treatment* pada siswa. Peningkatan sikap nasionalisme siswa ditunjukkan dari partisipasi dan antusias siswa pada saat menerima materi bela negara. Sesuai dengan tujuan pendidikan, bahwa pendidikan tidak hanya menargetkan hasil belajar siswa melainkan untuk membangkitkan semangat nasionalisme yang tinggi. Dengan demikian, pemberian pendidikan bela negara memiliki dampak positif terhadap perubahan sikap nasionalisme siswa *Community Learning Center* menjadi lebih baik.

Lebih lanjut penelitian Sinaga (2017) menyimpulkan bahwa kesiapan dan proses penyelenggaraan pendidikan bela negara di Puskidif sudah dapat dilaksanakan dengan baik, akan tetapi masih diperlukan adanya aturan, standarisasi, dan kompetensi untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan bela negara.

SIMPULAN

Implementasi pendidikan bela negara di SD Demangan dalam bentuk pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pembelajaran IPS dan pelaksanaan ekstra kurikuler pramuka diharapkan mampu membentuk semangat cinta tanah air serta kesadaran untuk rela berkorban bagi bangsa dan negara Indonesia serta mengurangi persoalan terpaparnya sebagian masyarakat Indonesia terhadap paham radikal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismaya, Erik Aditia. 2012. Mencetak Generasi Emas Yang Bermental dan Berkepribadian Baik Melalui Pendidikan Kepramukaan di Ambalan Jodhipati-Candrasari. *Prosiding Seminar Nasional "Merajut Generasi Emas Indonesia"*, Sabtu 15 September 2012 di Universitas Muria Kudus. Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.
- Ismaya, Erik Aditia dan Romadlon, Farid Noor. 2017. Strategi Membentuk Karakter Semangat Kebangsaan Anggota Ambalan Kyai Mojo dan Nyi Ageng Serang. *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7 (2): 140-144.
- Kennedy John F. 1961. Inaugural Address. (John F. Kennedy Presidential Library and Museum, National Archives and Records Administration, <http://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/BqXIEM9F4024ntFI7SVAjA.aspx>)
- Leonardi, Aska. 2013. Pengaruh Sosialisai Bela Negara Terhadap Sikap Bela Negara Guru Sekolah Dasar di Jakarta (Studi Eksplanatori Di Direktorat Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia). *Jurnal Ilmiah Komunikasi MAKNA*, 4 (1).
- Miles, M.B., and Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nainggolan, Natalia. 2016. Peranan Kepramukaan Dalam Membina Sikap Nasionalisme Pada Gugus Melati Banda

- Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Prodi PGSD FKIP Unsyiah* 1 (1): 88-97.
- Rahmawati. Ineu. 2017. Efektivitas Pendidikan Bela Negara Dalam Peningkatan Sikap Nasionalisme Siswa Indonesia Di *Community Learning Center Sarawak Malaysia. Jurnal Program Studi Manajemen Pertahanan*, 3 (1).
- Septiani, Y. 2014. Peran Guru IPS Dalam Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air di Lingkungan Sekolah. *Skripsi* (Online), (<http://repository.upi.edu>), diakses 10 Oktober 2016.
- Shihab, M. Quraish. 2018. *Islam yang Saya Pahami : Keragaman itu Rahmat*. Jakarta: Lentera Hati Grup.
- Sinaga, Herbert Rony P. 2017. Pendidikan Bela Negara Yang Diselenggarakan PUSDIKIF. *Jurnal Prodi Peperangan Asimetris*, 3 (3)
- Soepandji, Kris Wijoyo dan Farid, Muhammad. 2018. Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 (3): 436-456.
- Sumarlika, Alfiandra, dan Kurnisar. 2015. Fungsi Ekstrakurikuler Pada Kegiatan Kepramukaan Dalam Pembentukan Karakter Siswa Di SMP Negeri 4 Banyuasin III. *JURNAL BHINNEKA TUNGGAL IKA*, 2 (2).
- Susanto. Edi. 2007. Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di "Pondok Pesantren". *Tadrîs*, 2 (1).
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Wardana, Ludfi Arya dan Shalehuddin. 2017. Pelaksanaan Materi Bela Negara Dalam Membentuk Karakter Cinta Tanah Air Pada Mata Pelajaran IPS (Studi Kelas V Sdn curahsawo III Probolinggo). *Ar-Risalah*, XV (1).
- Zed, Mestika 2003. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zed, Mestika, 2008. *Metode Penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.